

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam menjalankan fungsi pelayanan pendidikan maka sekolah harus ditopang oleh seluruh komponen baik komponen *input* maupun komponen proses. Semua elemen sistem pendidikan sekolah seperti peserta didik, guru, tenaga non edukatif, kurikulum, sarana dan prasarana, dana, strategi dan metode pembelajaran, serta manajemen, dan dukungan lingkungan atau *stakeholders* dikelola ke arah tercapainya tujuan-tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, ke arah dihasilkan *ouput* dan *outcomes* yang sesuai dengan harapan semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan sekolah. Sekolah bukannya sekedar tempat berkumpul guru dan murid, tetapi sekolah berada dalam tatanan sistem yang baik dan saling berkaitan.

Agar sekolah dapat diberdayakan secara optimal, sekolah perlu diberikan kepercayaan dan wewenang (otonomi) serta kesempatan untuk mengelola sendiri sesuai dengan kondisi-kondisi obyektif di dalamnya dan sejalan dengan kebijakan Pemerintah mengenai pendidikan nasional dan desentralisasi. Untuk memenuhi kebutuhan ini Pemerintah merasa perlu untuk menerapkan dan mengembangkan model manajemen yang disebut “ *School Based Management*” atau Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). (Teguh Winarno, 2004:2)

Dengan mengalihkan otonomi pendidikan dari pemerintahan tingkat pusat departemen. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan samapai ketingkat Sekolah. Diharapkan sekolah akan lebih mandiri dan lebih mampu menentukan arah pengembangannya sesuai dengan kondisi dalam tatanan lingkungan masyarakat.

Otonomi pendidikan hendaknya didukung oleh otonomi sekolah, dan otonomi sekolah hendaknya didukung oleh otonomi guru. Otonomi sekolah itu dalam praktik mewujud dalam bentuk Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS memberi kesempatan besar bagi sekolah untuk melakukan konsep otonomi, dalam arti sekolah harus mandiri bukan hanya dalam hal keuangan melainkan juga dalam berbagai kebijakan pengelolaan sekolah berdasarkan visi dan misi yang disusun sendiri oleh sekolah, dan komponen-komponennya seperti kurikulum, silabus, administrasi, personalia (guru, pegawai, siswa), sarana dan prasarana.

Dalam hal otonomi guru kita dapat mengatakan bahwa otonomi itu langsung berhubungan dengan keprofesionalan guru karena dalam beberapa hal guru diberi wewenang untuk mandiri dalam menyusun silabus, merancang desain instruksional, menjalankan metode dan teknik mengajar di depan kelas, dan menyelenggarakan evaluasi hasil belajar.

Namun Isu yang berkembang saat ini umumnya Guru dalam skenario politik pendidikan hanyalah eksekutor dari kurikulum pendidikan yang telah didesain oleh pengambil kekuasaan atas kebijakan. Guru hanyalah “robot” kurikulum yang tidak memiliki otonomi penuh untuk merangkai materi pembelajaran yang transformatif.

Perwujudan dan penegakan otonomi guru memiliki hubungan yang erat dengan berbagai upaya untuk memberdayakan guru. Pemberdayaan guru bertolak dari kesadaran para guru bahwa sekolah merupakan miliknya, sehingga rasa memiliki ini dapat memacu kinerja guru dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal di bidang pendidikan kepada para siswa, wali murid, dan masyarakat.

Sehingganya tidak mengherankan lagi bahwa sebagian besar guru tidak mengerti cara membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, perangkat pembelajaran, penggunaan media bahkan kesulitan dalam memilih buku materi pembelajaran. Bahkan untuk membuat soal-soal untuk ulangan semester, kepala sekolah harus membayar sekian rupiah untuk membeli soal kepada sekolah yang lain. Yang seharusnya soal tersebut dibuat oleh guru yang mengerti dan memahami materi apa yang sudah dipahami peserta didik.

Hal ini juga tercermin dari tidak merdekanya guru dalam menentukan materi pelajaran, penggunaan buku pelajaran, hingga pelaksanaan evaluasi yang masih didominasi oleh kepala sekolah. Padahal dalam Kurikulum yang dilaksanakan sekarang ini yaitu KTSP Pemerintah telah menyerahkan sepenuhnya kewenangan untuk menyusun kurikulum pada masing-masing unit pendidikan (sekolah) yang mensyaratkan otonomi sekolah dan otonomi guru pada porsi yang tepat. Berkaitan dengan masalah tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Otonomi Guru dalam Manajemen Berbasis Sekolah di SMP 2 Tolangohula”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penelitian ini difokuskan pada pembahasan dalam skripsi ini meliputi:

1. Kemandirian dalam pengambilan keputusan di SMP Negeri 2 Tolangohula.
2. Kemandirian dalam pengembangan program pengajaran di SMP Negeri 2 Tolangohula.
3. Kemandirian dalam inovasi pembelajaran sekolah di SMP Negeri 2 Tolangohula.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kemandirian dalam pengambilan keputusan di SMP Negeri 2 Tolangohula.
2. Untuk mengetahui kemandirian dalam pengembangan program pengajaran di SMP Negeri 2 Tolangohula.
3. Untuk mengetahui kemandirian dalam inovasi pembelajaran sekolah di SMP Negeri 2 Tolangohula.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Kepala sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah paradigmatik ataupun menjadi bahan pertimbangan sekaligus rujukan tentang adanya kewenangan guru dalam sekolah sehingga merancang atau paling tidak menempuh langkah-langkah perbaikan dalam rangka memperbaiki kinerja guru dalam manajemen kurikulum berbasis sekolah.

2. Bagi guru dapat menjadi sumber informasi sejauh mana kewenangan dan kemandirian guru di sekolah sehingga menjadi acuan dalam melaksanakan tugas.
3. Bagi siswa, dengan adanya otonomi guru dalam manajemen berbasis sekolah di SMP Negeri 2 Tolangohula dari segi penyusunan perangkat pembelajaran, pemilihan media dan sumber belajar maka proses pembelajaran akan lebih efektif.
4. Bagi penulis, hasil Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan penulis/peneliti tentang otonomi guru dalam Manajemen berbasis Sekolah di SMP Negeri 2 Tolangohula sebagai pengaplikasian Ilmu yang diterima di Bangku perkuliahan.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami skripsi ini, maka perlu dijelaskan tentang definisi operasional yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Otonomi Guru:

Otonomi menurut kamus besar bahasa Indonesia (2007:233) adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dng peraturan perundang-undangan yg berlaku.

Guru adalah orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar. (KBBI, 2007:156)

Jadi yang dimaksud dengan otonomi guru dalam penelitian ini adalah kewenangan guru selaku tenaga pengajar dalam kegiatan pembelajaran di sekolah.

2. MBS singkatan dari Manajemen Berbasis sekolah yaitu wewenang dan tanggung jawab yang lebih luas kepada sekolah bersama komite untuk membuat keputusan dalam lingkup sekolah yang dipimpinnya

Sehingga dapat disimpulkan bahwa otonomi guru dalam manajemen berbasis sekolah dimaksudkan kewenangan guru dalam meningkatkan otonomi sekolah, menentukan sendiri apa yang perlu diajarkan, dan mengelola sumber daya yang ada untuk berinovasi.